

ABSTRAK

Penyelenggaraan Puskesmas BLUD memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan keuntungan sesuai dengan penyelenggaraan usaha yang sehat, BLUD berupaya memberikan pelayanan yang lebih bertanggung jawab, akuntabel, hemat biaya, dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem BLUD Puskesmas di kabupaten Bangli terkait aktor, konten, konteks dan proses.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi dokumen dan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur. Data yang dikumpulkan di validasi menggunakan Teknik triangulasi data.

Kabupaten Bangli masih kekurangan SDM untuk menjalankan BLUD,, Peraturan BLUD ditetapkan melalui SK Bupati. Pelaksanaan pencairan dana tidak melalui bendahara Dinkes Kabupaten dan pengadaan barang dan jasa di Puskesmas sudah dilakukan sendiri oleh Puskesmas.

Pelaksanaan BLUD dimulai dari perencanaan pengadaan, belanja, pencairan dana sampai pelaporan dikerjakan sendiri oleh Puskesmas. Alur pencairan dana setelah diberlakukan BLUD lebih singkat karena langsung ke BKPAD tanpa melalui Dinas Kesehatan. Alur pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan dimana sudah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sudah dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Kepada Puskesmas dan Dinas kesehatan agar menambah SDM untuk penyelenggaraan BLUD.

Kata Kunci : Bangli, Penerapan BLUD, Puskesmas

ABSTRACT

The implementation of the BLUD Health Center pays attention to the principles of fairness, decency and profit in accordance with the implementation of a healthy business, BLUDs strive to provide services that are more responsible, accountable, cost-effective and effective. The purpose of this study was to analyze the implementation of the BLUD system at the Puskesmas in Bangli district in terms of actors, content, context and process.

The method used in this research is descriptive qualitative. Data were collected by document observation and in-depth interviews using a structured interview guide. The data collected was validated using data triangulation techniques.

Bangli Regency still lacks human resources to run BLUDs. BLUD regulations are stipulated through a District Head's Decree. The disbursement of funds did not go through the treasurer of the District Health Office and the procurement of goods and services at the Puskesmas had been carried out by the Puskesmas itself.

BLUD implementation starts from procurement planning, expenditure, disbursement of funds to reporting done by the Puskesmas itself. The flow of disbursement of funds after the implementation of the BLUD is shorter because it goes directly to BKPAD without going through the Health Office. The flow of reporting is in accordance with the provisions in which the Government Accounting Standards (SAP) have been used and audits have been carried out by the Public Accounting Firm (KAP). To the Puskesmas and the Health Service to add human resources for the implementation of BLUDs.

Keywords: *Bangli, Application of BLUD, Primary health care*